

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Menurut (Mulyanto, Kuswara, & Kusmara, 2017, p. 18) menyebutkan bahwa, Sistem Informasi adalah suatu sistem yang terdiri dari kumpulan komponen sistem yaitu software, hardware dan brainware yang memproses informasi menjadi sebuah output yang berguna untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi.

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan primer yang sejak dini hingga dewasa haruslah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pendidikan sebagai gejala yang universal, merupakan suatu keharusan bagi manusia, karena disamping pendidikan sebagai gejala sekaligus juga sebagai upaya memanusiakan manusia itu sendiri. Dengan perkembangan kebudayaan manusia, timbulah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara dengan lebih baik, lebih teratur dan didasarkan atas pemikiran yang matang.

Manusia ingin lebih memper tanggung jawabkan caranya dia mendidik generasi penerusnya agar lebih berhasil dalam melaksanakan hidupnya, dalam pertemuan dan pergaulan, Pendidikan merupakan pemotong mata rantai pendidikan kemiskinan. Melalui pendidikan yang mencukupi seseorang dapat layak seperti yang diharapkan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya mewariskan nilai-nilai yang akan menjadi penolong dan penentu umat manusia dalam menjalani kehidupannya dan sekaligus untuk perbaikan nasib dan peradaban umat manusia.

Namun ternyata masih banyak masyarakat yang dari kalangan menengah kebawah yang tidak mampu untuk membiayai pendidikan putra-putrinya walau sampai 9 tahun saja. Krisis global semakin membuat kehidupan yang sudah sulit menjadi semakin rumit bahkan telah menjadi suatu dilema dan masalah klasik yang tidak pernah kunjung selesai. Permasalahan yang kian nampak dan semakin menjadi-jadi adalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan yang dapat dirasakan oleh mereka.

Menurut (Siagian, 2006, p. 273) menyebutkan bahwa Pendidikan adalah keseluruhan proses tehnik dan metode belajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pada pasal 1 ayat 26 dijelaskan bahwa warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan pasal 4 ayat 1, pendidikan dilaksanakan secara demokratis dan berkeadilan serta

tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

Pada pasal 34 ayat 2 tertera bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan, bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/Mts serta satuan pendidikan yang sederajat). Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan pengurangan subsidi BBM secara drastis. Masyarakat langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM berupa melambungnya kebutuhan pokok dan pendidikan.

Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM, pemerintah merealokasikan anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan Subsidi Langsung Tunai (SLT). Sebagai konsekuensi dalam bidang pendidikan, maka pemerintah selain mengeluarkan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang dibayar oleh masyarakat dengan tetap mempertahankan mutu pendidikan. Panduan Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) 2012.

Setelah Pemerintah menetapkan kebijakan BOS sebagai salah satu pendukung untuk menuntaskan program Wajib Dikdas 9 Tahun, ternyata kebijakan BOS tersebut belum mampu menjamin seluruh masyarakat untuk dapat sekolah, terutama bagi anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga miskin. BOS yang diberikan kepada lembaga penyelenggara Wajib Dikdas setara SD/MI dan SMP/MTs, hanya mampu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus dikeluarkan masyarakat, tetapi tidak mampu untuk membebaskan seluruh biaya pendidikan, sehingga banyak siswa miskin yang tidak sanggup atau melanjutkan pendidikannya karena harus

mengeluarkan biaya untuk buku, transportasi, seragam madrasah, sepatu, buku tulis atau biaya lainnya yang tidak dapat dipenuhi dari dana BOS. Sementara kita semua melihat bahwa mayoritas siswa berasal dari keluarga kurang mampu bahkan dapat dikategorikan miskin.

Bantuan Siswa Miskin yang diberikan kepada sebagian siswa miskin di tingkat Sekolah Dasar/MI, walaupun jumlah siswa yang mendapatkan bantuan ini masih sangat terbatas akan tetapi dengan program Bantuan siswa miskin ini, diharapkan dapat membantu Sebagian siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin di dalam membiayai sebagian kebutuhan pendidikannya, sehingga dapat menyelesaikan pendidikannya, bahkan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Bantuan Siswa Miskin merupakan bantuan langsung kepada siswa yang berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan beasiswa prestasi. Bantuan siswa miskin diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, Bantuan siswa miskin memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti pendidikan di level yang lebih tinggi.

Selain itu, bertujuan untuk mengurangi jumlah siswa putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan. Kebijakan bantuan Bantuan siswa miskin bertujuan agar siswa dari kalangan tidak mampu dapat terus melanjutkan pendidikan di sekolah. Program ini bersifat bantuan bukan beasiswa, karena jika beasiswa bukan berdasarkan kondisi ekonomi siswa, melainkan berdasarkan prestasi.

Bantuan Siswa Miskin merupakan salah satu bentuk kompensasi pemerintah atas kenaikan harga BBM untuk sektor pendidikan dimana bantuan ini ditujukan untuk siswa kurang mampu agar dapat bertahan dan melanjutkan pendidikannya yang dalam penetapan penerimanya diseleksi oleh pemerintah daerah setempat. Melalui Program Bantuan Siswa miskin, diharapkan anak usia sekolah dari rumah tangga/keluarga miskin dapat terus bersekolah, tidak putus sekolah, dan di masa depan diharapkan mereka dapat memutus rantai kemiskinan yang saat ini dialami orangtuanya. Program Bantuan Siswa Miskin juga mendukung komitmen pemerintah untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan di Kabupaten/Kota miskin dan terpencil serta pada kelompok marjinal.

Program Bantuan siswa miskin adalah salah satu alasan rendahnya partisipasi pendidikan khususnya pada kelompok miskin. Tingginya biaya Pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Biaya langsung meliputi antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung meliputi antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Keadaan tersebut tentu sangat berpengaruh pada rendahnya angka partisipasi pendidikan penduduk miskin terutama disebabkan oleh banyaknya putus sekolah dan angka tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut. Hal tersebut jelas

mengungkapkan bahwa penduduk miskin tidak akan mampu menjangkau pendidikan jika tidak dibantu oleh pemerintah. Bantuan siswa miskin adalah bantuan yang diberikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu atau pra sejahtera untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah.

Bantuan siswa miskin berupaya meringankan biaya pendidikan siswa, bisa dalam bentuk pembiayaan iuran bulanan sekolah dan atau pembelian perlengkapan belajar siswa, dan atau transportasi siswa ke sekolah. Program bantuan tersebut diambil sebagai salah satu Langkah penanggulangan kemiskinan, di mana salah satu yang dianggap dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan pendidikan yang lebih memadai dan merata diharapkan masyarakat akan lebih dapat bersaing dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah.

Jumlah siswa yang mendapatkan BSM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Setiap sekolah yang mendapatkan kuota penerima bantuan melakukan seleksi tertentu untuk menetapkan penerima bantuan, selanjutnya bantuan tersebut dialokasikan langsung kepada siswa penerima bantuan. Dalam pemberian dana Bantuan Siswa Miskin diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat miskin, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikannya.

Begitu pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa, diharapkan pemberian BSM dapat membantu semangat untuk bersekolah pada masyarakat ekonomi lemah dan mengurangi jumlah siswa putus sekolah. Dalam suatu daerah terjadi pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah Provinsi yaitu kabupaten yang di pimpin oleh Bupati sedangkan Kota dipimpin oleh Wali Kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama.

Kabupaten bukanlah bawahan dari provinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Bupati adalah jabatan kepala daerah di tingkat kabupaten (daerah tingkat II). Bupati dibantu oleh wakil bupati yang memimpin suatu kabupaten. Dalam masing masing daerah Kabupaten itu sendiri banyak program program yang berbeda tiap daerah nya Contohnya Kabupaten Bogor memiliki Program yang Bernama PANCAKARSA, Karena panca itu artinya adalah mengandung lima tekad yaitu Pancakarsa. Dalam lima keinginan atau lima tekad, kita ingin Kabupaten Bogor ini sehat, cerdas, maju, membangun, dan berkeadaban;

Berdasarkan perbup No. 99 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemberian beasiswa PANCAKARSA bagi pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu, dalam rangka mewujudkan salah satu program Pancakarsa bogor cerdas dan meningkatkan kualitas sumber daya pemuda serta memberikan stimulan kepada pemuda

berprestasi dari keluarga tidak mampu dalam mengikuti Pendidikan tinggi, maka pemerintah kabupaten bogor perlu memberikan bantuan terhadap putera/puteri daerah yang kurang mampu;

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada Pasal 67 yang ayat (1a) yang berisi "Ujian Nasional untuk satuan pendidikan jalur formal pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk SD/MI/SDLB. Namun masih banyak pula siswa yang berasal dari kalangan masyarakat kurang mampu atau menengah kebawah tidak dapat menyekolahkan putra-putrinya, maka dari itu diadakan Program Bantuan Siswa Miskin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) Bantuan dapat dimaknai sebagai memberikan pertolongan berupa barang yang dapat digunakan oleh seseorang.

Sama halnya dengan Sekolah Dasar lainnya sekolah akan memberikan bantuan kepada siswa-siswi yang kurang mampu saat menjalankan pendidikan. Karena banyak sekali siswa-siswi yang putus sekolah karena mengalami kendala yaitu salah satunya ekonomi. Biasanya dalam pemberian bantuan yang dilakukan secara subjektif yaitu hanya dengan mengira-ngira saja bahwa siswa atau siswi tersebut layak untuk mendapatkan bantuan.

Hal tersebut akan menimbulkan kemungkinan bahwa terdapat unsur ketidaktepatan sasaran dalam penerimaan bantuan tersebut. Salah satu faktor yang paling mempengaruhi dalam penerimaan bantuan yaitu pekerjaan orang tua dari siswa yang bersangkutan, karena apabila pekerjaan yang dijalani oleh orang tua tersebut masuk dalam kategori kurang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka dari itu siswa tersebut akan mengalami banyak kendala saat mengikuti pelajaran di sekolah. Penerimaan bantuan yang tepat sangat diperlukan agar tidak ada lagi siswa miskin yang merasa dirugikan karena ketidak tepatan nya pemilihan bantuan tersebut.

Selain itu juga agar tidak ada lagi siswa yang putus sekolah dikarenakan kesulitan ekonomi. Semakin efektif proses dalam penerimaan bantuan maka semakin besar pula kemungkinan mendapatkan siswa yang benar-benar layak menerima bantuan. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dimasa depan dalam penerima bantuan maka dibutuhkan sebuah acuan yang dapat mempermudah dalam pemilihan nya guna mendapatkan hasil yang akurat yaitu menggunakan data-data akademik dan non-akademik siswa.

Proses penyeleksian program Bantuan Siswa Miskin yang terjadi dilapangan belum efektif dalam mendukung keputusan, pihak sekolah masih menentukan berdasarkan acuan dasar saja tanpa mengkalkulasi perhitungan lebih terperinci. Selain itu, cara seperti ini mengakibatkan perhitungan belum efektif karena pemangku keputusan membutuhkan waktu untuk mempertimbangkannya. Tentu saja

pengambilan keputusan belum efektif dan bahkan bisa menjadi penyebab tidak tepatnya sasaran dalam memberikan bantuan sehingga terjadinya kecurangan dan hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin ini pihak Dinas Pendidikan sering menghadapi masalah dalam menentukan calon penerima Bantuan Siswa Miskin dimana tidak semua siswa yang berasal dari keluarga miskin dapat menerima Program Bantuan Siswa Miskin. Maka dari sekian banyak siswa calon penerima bantuan siswa miskin yang sudah memenuhi kriteria dalam penyeleksian bantuan siswa miskin, tidak semua akan menjadi calon penerima bantuan siswa miskin tersebut. Sehingga dalam penyeleksian calon penerima bantuan siswa miskin ini harus memerlukan Sistem Pendukung Keputusan (SPK).

Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa dan bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa, sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Semestinya dengan diperolehnya BSM siswa dapat memenuhi kebutuhan operasionalnya. Lebih jauh jika kebutuhan operasional sekolah tersebut terpenuhi untuk pembelian peralatan akademik (Seragam sekolah dan buku)

Berkaitan dengan masalah diatas, maka peneliti berencana akan mengadakan penelitian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Dalam penelitian ini akan dikembangkan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah dinas pendidikan dalam menganggarkan biaya siswa miskin yang layak menerima bantuan, mempersingkat waktu dalam proses menentukannya, serta aplikasi yang akan dibuat menerapkan metode Simple Additive Weighting (SAW). Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal istilah metode pejumlahan terbobot.

Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut (Fishburn, 1967) (MacCrimmon, 1968). Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Berdasarkan uraian di atas, metode SAW diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait penerima bantuan siswa miskin berdasarkan data-data akademik dan non-akademik.

## **B. Permasalahan**

Rekomendasi merupakan saran yang didasari dengan penilaian yang baik untuk diberikan kepada pihak yang membutuhkan ditengah sulitnya dalam menentukan pilihan. Bantuan siswa miskin adalah bantuan yang di berikan kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah. Bantuan memberi peluang bagi siswa untuk mengikuti Pendidikan di level yang lebih tinggi.

Dari pemerintah daerah Kabupaten Bogor itu diperutukan untuk kategori siswa miskin atau kurang mampu yaitu kalau kita mengacu ke Permensos No 03 tahun 2021 pendataan pada siswa kurang mampu dengan ketentuan dasar yang mengatur untuk menentukan siswa mana yang berkategori miskin yaitu yang memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) dari semua SD Negeri di Kabupaten Bogor karna anggarannya hanya untuk 1543 sekolah dasar negeri jadi anggarannya itu sekitar 105.000 orang awalnya di tahun 2019 dan untuk tahun 2022 sekarang sekitar 34.859.

Pada saat bagian pendataan, pemerintah dinas Pendidikan menyerahkan pendataan untuk ditampung di setiap masing masing sekolah yang sudah ditentukan syarat yang berhak mendapat bantuan yang memiliki KIP (Kartu Indonesia Pintar), PKH (Program Keluarga Harapan), DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) namun sekolah masih mendaftarkan yang belum memiliki kriteria aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah terkadang yang belum memiliki KIP,PKH dan DTKS masih ada sekolah yang mendaftarkan siswa nya yang belum memiliki kriteria tersebut, pihak dinas Pendidikan terkait ini menjadi bingung mana yang layak untuk menerima dan mana yang tidak di karnakan sekolah tersebut tidak mendengarkan intruksi yang sudah diberikan, terpaksa pihak dinak pendidikan memilih secara random siswa/siswi mana yang harus di hapus pada pendataan tersebut, tentu saja hal tersebut tidak efektif dan dapat menimbulkan terjadinya kesalahan dalam rekomendasinya.

Berdasarkan data yang di peroleh dari tahun 2020-2021 menunjukkan adanya data siswa/siswi yang terpilih menjadi penerima bantuan siswa miskin sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Data Rekomendasi penerima bantuan siswa miskin tahun 2020-2021**

No	Nama	NISN	Kriteria Anak 1.No KIP 2.No PKH 3.No DTKS 4.Tanpa Keterangan	Kriteria Orang Tua		Tanggung an Oran g Tua	Gaji Oran gTua	Penerima
				AYA H	IBU			
1	Fani Safira	3143648777	2	A2	A5	3	3Jt	Menerima
2	Muhama d Andika	3140838127	1	A4	A5	4	1,5Jt	Menerima
3	Muhama d Nabil	3140405120	2	A2	A5	2	2.5Jt	Menerima

4	Muhama d Akhmal Alanwar	31428475 21	1	A1	A5	4	4Jt	Tidak
5	Raisa Lestari	01435059 82	1	A1	A5	2	4,5Jt	Menerima
6	Althaf Ziddan Fahrezi	31494715 79	4	A3	A5	5	3.5Jt	Tidak
7	Ahza Nabhan Naibaho	01359466 39	4	A1	A5	1	4.Jt	Tidak
8	Siti Zakiya Bilqis R	31502155 00	3	A3	A5	4	3.5Jt	Menerima
9	Sahrul Widianto	31488989 52	4	A1	A5	2	3.2Jt	Tidak
10	Syafira Octavia Uruwaya	31491947 58	1	A1	A5	6	3.6Jt	Menerima
11	Alvia Komaria h	31365407 89	4	A1	A5	2	4Jt	Tidak
12	Salsabil a Akifah	01478955 51	4	A1	A5	1	4.5Jt	Tidak
13	Bilqis Ade Putri	31460728 36	4	A4	A5	2	1.8Jt	Tidak
14	Daffa Pratama Putra	31469227 12	2	A2	A5	3	4.3Jt	Menerima
15	Hilma Maulida Iqbal	01443359 80	3	A3	A5	4	4Jt	Menerima
16	Kanssa Nurul Apendi	31559555 96	3	A4	A5	7	2Jt	Menerima

17	Malik Ibrahim	3158287510	1	A1	A5	2	3.8Jt	Tidak
18	Muhama d Rizky Maulana	3141303273	3	A4	A5	6	2.3Jt	Menerima
19	Muhama d Akbar Habibi	3149194758	2	A3	A5	2	3Jt	Menerima
20	Melisa Nurmaulida	3136540789	3	A4	A5	3	2,5Jt	Menerima
A1= PNS/TNI/PORLI A2= Karyawan Swasta A3= Wiraswasta/wirusaha A4= Buruh A5= Tidak Bekerja								

Berdasarkan Tabel 1.1 Data Pemilihan penerima bantuan siswa miskin tahun pelajaran 2020-2021 yang masih kurang efektif dan efisien seharusnya ada yg harus layak menerima namun tidak mendapatkan bantuan diantaranya dapat dilihat pada table 1.1 No 13 dimana calon penerima dengan nama bilqis ade putri tidak mendapatkan bantuan dimana seharusnya siswi tersebut menerima bantuan karena sesuai dengan kriteria ditentukan. Berdasarkan fakta yang ada pemilihan penerima bantuan siswa miskin yang dilakukan selama ini ada indikasi bahwa murid yang terpilih sebagai penerima bantuan siswa miskin masih kurang tepatnya sebagai penerima bantuan siswa miskin tersebut dilihat pada usulan siswa yang diajukan setiap kecamatan yaitu tidak ada nya seleksi dalam pengajuan tersebut, otomatis dinas pendidikan akan mengajukan data yang telah diajukan oleh setiap kecamatan tanpa melihat apakah ajuan setiap kecamatan sudah sesuai kriteria atau belum, terkadang setiap kecamatan suka melebihi kuota dimasing masing sekolah yang akan diajukan nya karna setiap sekolah ada batas murid yang akan berhak mendapatkan bantuan tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa tidak akurat dalam pemilihan penerima bantuan siswa miskin tersebut.

#### 1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas maka dapat disimpulkan identifikasi masalah yaitu:

- a. Belum tepat dalam penetapan penerima bantuan siswa miskin;
- b. Belum efektif proses rekomendasi penerima bantuan siswa miskin.

#### 2. Pernyataan Masalah (*Problem Statement*)

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat ditetapkan pokok masalah yaitu belum tepat dan belum efektif dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin.

### 3. **Pertanyaan Penelitian (*Research Question*)**

Pertanyaan penelitian yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin?;
- b. Berapa tingkat ketepatan dan efektifitas penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin?.

### **C. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah menerapkan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin. Sementara Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan proses rekomendasi penerima bantuan siswa miskin yang lebih tepat dan efektif;
2. Mendapatkan proses rekomendasi penerima bantuan siswa miskin yang lebih efektif;
3. Mengembangkan prototype aplikasi rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
4. Mengukur tingkat ketepatan dan efektifitas penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;
5. Dapat memberikan rekomendasi bantuan siswa miskin dengan menggunakan variable identitas bantuan, pekerjaan orang tua, status anak, tanggungan orang tua, penghasilan orang tua;
6. Dengan menerapkan metode *Simple Additive Weighting* pada *prototype* sistem rekomendasi bantuan siswa miskin sekaligus membantu dinas pendidikan dalam menentukan siswa yang lebih tepat untuk mendapatkan bantuan dengan lebih mudah.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dalam rangka mengembangkan penerapan teknik komputasi melalui pemodelan SAW untuk pemberian bantuan siswa miskin. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan mengenai penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin;

2. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu memudahkan dinas pendidikan untuk pemberian bantuan siswa miskin;
3. Manfaat kebijakan penelitian ini yaitu dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan dalam memilih bantuan siswa miskin.

#### **E. Spesifikasi Hasil Yang Diharapkan**

Melalui penelitian ini terciptanya sebuah aplikasi untuk memberikan bantuan siswa miskin dengan menerapkan metode SAW untuk mempermudah dalam pemilihan bantuan siswa miskin. Dalam aplikasi yang dikembangkan terdapat 5 menu yaitu data siswa, pembobotan kriteria, model, penilaian, laporan penerimaan bantuan siswa miskin.

#### **F. Asumsi dan Keterbatasan**

##### **1. Asumsi**

Asumsi dalam penelitian ini yang akan dikembangkan yaitu :

- a. Dalam rekomendasi penerima bantuan siswa miskin akan tepat apabila metode dalam menguji hasil sudah tepat;
- b. Pengembangan yang dilakukan menerapkan alur metode SAW dengan menghitung jumlah bobot yang tepat.
- c. Dinas Pendidikan memiliki data-data siswa yang lengkap berdasarkan variabel yang sudah ditentukan untuk menghasilkan sebuah hasil yang diinginkan.

##### **2. Keterbatasan**

Dalam penelitian ini pengembangan yang dikembangkan terdapat beberapa keterbatasan, yaitu :

- a. Pengoperasian ini hanya dapat digunakan untuk rekomendasi penerima bantuan siswa miskin pada variable kriteria anak;
- b. Data yang digunakan dalam penerima bantuan siswa miskin adalah tahun 2021;
- c. Sistem yang dikembangkan akan lebih akurat apabila dikolaborasikan dengan metode penelitian yang lain.

#### **G. Definisi Istilah Atau Definisi Operasional**

1. Penerima adalah pihak yang memperoleh atau mendapatkan sebuah bantuan yang diberikan oleh pemerintah;
2. Bantuan adalah berbentuk uang yang akan dibagikan ke penerima;
3. Miskin adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, Pendidikan dan kesehatan;

4. Program adalah rancangan mengenai bantuan yang akan diberikan kepada siswa miskin/tidak mampu;
5. Pemerintah adalah sistem yang menjalankan wewenang dan kekuasaan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu negara dan bagian – bagiannya seperti bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu;
6. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah yang mengadakan sebuah program yang diusulkan oleh pemimpin daerah yang mengadakan program bantuan siswa miskin.